



PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, UMP, DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI JAWA BARAT

Selvi Nur Hikmawati¹ I Nyoman Mahaendra Yasa²

Article history:

Submitted: 01 Agustus 2022

Revised: 09 Agustus 2022

Accepted: 12 Agustus 2022

Keywords:

Economic growth;
Provincial minimum wage
(UMP);
Level of education;
Employment.

Kata Kunci:

Penyerapan tenaga kerja.
Pertumbuhan ekonomi;
Tingkat pendidikan;
Upah minimum provinsi
(UMP);

Koresponding:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Udayana, Bali,
Indonesia
Email:
selvinurhikmawati@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to analyze the effect of economic growth, UMP, and education level simultaneously and partially on employment in West Java Province. This study uses secondary data obtained from the BPS of West Java Province in the time span from 2005-2019 (15 years), with 15 observation points. The method of data collection in this study is the non-participant observation method. The analysis technique used is multiple linear regression analysis. The results showed that economic growth, UMP, and level of education simultaneously had a significant effect on employment. Economic growth, UMP, and level of education partially have a positive and significant effect on employment. Education level is a variable that has a dominant influence on employment.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, UMP, dan tingkat pendidikan secara simultan dan parsial terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BPS Provinsi Jawa Barat dalam rentang waktu dari tahun 2005-2019 (15 tahun), dengan 15 titik pengamatan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan metode observasi non partisipan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, UMP, dan tingkat pendidikan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi, UMP, dan tingkat pendidikan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Tingkat pendidikan merupakan variabel yang berpengaruh dominan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia²

Email: mahaendrayasa@unud.ac.id

PENDAHULUAN

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang amat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi sosial dan ekonomi. Tenaga kerja sebagai salah satu dari faktor produksi merupakan unsur yang penting dan paling berpengaruh dalam mengelola dan mengendalikan sistem ekonomi, seperti produksi, distribusi, konsumsi maupun investasi. Pembangunan ekonomi tidak lepas dari peran manusia dalam mengelolanya, dimana manusia merupakan tenaga kerja, input pembangunan, dan juga merupakan konsumen hasil pembangunan itu sendiri.

Penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah atau banyaknya orang yang bekerja diberbagai sektor. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring berlangsungnya demografi. Penyerapan tenaga kerja diartikan sebagai jumlah tertentu dari tenaga kerja yang digunakan dalam satuan unit usaha tertentu atau penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang bekerja dalam satuan unit usaha. Terjadinya penyerapan tenaga kerja disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja, oleh karena itu, penyerapan tenaga kerja dapat dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja. Menurut UUD RI 1945 pasal 27 ayat 2, menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, artinya bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan memperoleh upah untuk mencukupi kebutuhan hidup layak (KHL) tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat.

Seiring dengan berubahnya lingkungan makro ekonomi mayoritas negara-negara berkembang, angka pengangguran yang meningkat pesat disebabkan oleh terbatasnya permintaan tenaga kerja, faktor-faktor eksternal seperti memburuknya neraca pembayaran, meningkatnya masalah utang luar negeri dan kebijakan lainnya, yang pada akhirnya akan mengakibatkan kemerosotan pertumbuhan industri, tingkat upah dan akhirnya penyediaan lapangan kerja (Todaro, 2006:157). Ekonomi pada hakikatnya merupakan serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, serta mengarahkan distribusi pendapatan yang merata. Pembangunan ekonomi memiliki beberapa tujuan inti diantaranya adalah peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup, peningkatan standar hidup penyediaan lapangan kerja, pendapatan, perbaikan kualitas tingkat pendidikan, peningkatan perhatian atas nilai-nilai kebudayaan dan kemanusiaan dan perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial. Kegiatan pembangunan yang direncanakan dan dilakukan haruslah mampu menyentuh dan dirasakan hingga masyarakat kecil (Nurman, 2003).

Pembangunan ekonomi tidak dapat terlepas dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi memajukan pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi mendorong proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro keberhasilan pembangunan sehingga semua negara berupaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi guna menciptakan kesejahteraan masyarakat khususnya bagi negara berkembang (Kurniasih, 2017). Pertumbuhan ekonomi selalu digunakan sebagai ungkapan umum yang menggambarkan tingkat perkembangan suatu negara yang diukur dengan penambahan pendapatan nasional riil. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi suatu negara. Dalam kegiatan ekonomi yang sebenarnya, pertumbuhan ekonomi berarti pembangunan ekonomi fisik (Dwiarta, 2020). Menurut Schumpeter pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyak faktor produksi yang dipergunakan dalam proses produksi tanpa ada perubahan cara-cara teknologi itu sendiri (Boediono, 2012:48). Indikator pertumbuhan ekonomi tidak hanya mengukur tingkat pertumbuhan output dalam suatu perekonomian, namun memberikan indikasi sejauh mana aktivitas perekonomian yang terjadi pada periode tertentu yang telah menghasilkan pendapatan untuk masyarakat (Pratiwi, 2019). Pertumbuhan

ekonomi dapat menyebabkan perubahan volume pengeluaran atau beberapa komponennya misalnya, melalui perubahan permintaan barang atau jasa publik tertentu (Nikoloski, 2020). Pertumbuhan ekonomi dapat menjadi indikator atau ukuran pencapaian tingkat kemakmuran dan kesejahteraan, sehingga setiap negara dan daerah berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Akbar, 2021).

Adam Smith dalam bukunya *“An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of the Nation”* mengemukakan faktor – faktor yang menimbulkan pembangunan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperluas pasar dan perluasan pasar akan mendorong tingkat spesialisasi, dengan adanya spesialisasi akan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi atau mempercepat proses pembangunan ekonomi, karena spesialisasi akan mendorong produktivitas tenaga kerja dan mendorong perkembangan teknologi. Menurut teori klasik, pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh adanya perpacuan antara perkembangan penduduk dan kemajuan teknologi (Suryana, 2000:53).

Tabel 1.
Penyerapan Tenaga Kerja dan Perkembangannya di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Penyerapan Tenaga Kerja (Orang)	Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja (%)
1	2015	20.456.889	0.05
2	2016	20.277.112	-0.09
3	2017	20.551.575	0.01
4	2018	20.779.888	0,01
5	2019	21.902.958	0.05

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2021

Penyerapan tenaga kerja pada Tabel 1. menunjukkan bahwa terjadi perubahan setiap tahunnya, pada tahun 2015 penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat sebesar 20.456.889 orang dengan perkembangan penyerapan tenaga kerja sebesar 0.05 persen, penyerapan tenaga kerja terus mengalami perubahan hingga tahun 2019, dengan perkembangan penyerapan tenaga kerja yang berfluktuasi setiap tahunnya, pada tahun 2016 sebesar -0.09 persen, pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 0.01 persen lalu pada tahun 2018 tidak terjadinya perubahan pada penyerapan tenaga kerja yaitu tetap sebesar 0.01 persen dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 0.05 persen. Penyerapan tenaga kerja sebagai jumlah dari tenaga kerja yang digunakan dalam satuan unit usaha tertentu atau dengan kata lain penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah tenaga kerja yang bekerja dalam suatu unit usaha. Terjadinya penyerapan tenaga kerja disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja oleh karena itu, penyerapan tenaga kerja dapat dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja (Pratiwi, 2019).

Pertumbuhan penduduk mengakibatkan bertambahnya angkatan kerja, tidak hanya berdampak positif terhadap penyediaan tenaga kerja yang produktif, tetapi memberikan dampak negatif dengan bertambahnya jumlah pengangguran apabila lapangan pekerjaan yang ada tidak mampu menampung banyaknya jumlah tenaga kerja tersebut. Ketimpangan antara jumlah pencari kerja dan lapangan pekerjaan yang tersedia umumnya terjadi di negara yang sedang berkembang.

Tabel 2.
Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2019

No.	Tahun	Pertumbuhan Penduduk (Jiwa)
1	2005	39.960.869
2	2006	40.737.594
3	2007	41.483.729
4	2008	42.194.869
5	2009	42.693.951
6	2010	43.227.107
7	2011	43.938.796
8	2012	44.643.586
9	2013	45.340.799
10	2014	46.029.668
11	2015	46.709.569
12	2016	47.379.389
13	2017	48.037.827
14	2018	48.683.861
15	2019	49.316.712

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2021

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat adanya peningkatan jumlah penduduk sebesar 46.709.569 jiwa di tahun 2015 dan terus tumbuh hingga 49.316.712 jiwa pada tahun 2019 (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2021). Dari data yang ada menunjukkan peningkatan jumlah penduduk terjadi di setiap periodenya. Adanya peningkatan jumlah penduduk harapan untuk kedepannya pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat meningkatkan kualitas penduduknya agar mampu menghasilkan produksi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Selain peningkatan penduduk juga harus diimbangi dengan penambahan jumlah lahan pekerjaan agar tidak mengakibatkan lahan pengangguran yang terus meningkat. Perluasan penyerapan tenaga kerja dibutuhkan untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk usia muda yang masuk kedalam kategori pasar tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja merupakan diterimanya para pelaku tenaga kerja untuk melakukan tugas sebagaimana mestinya atau adanya suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya pekerja atau lapangan pekerjaan untuk diisi oleh pencari kerja (Todaro, 1998).

Ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan penciptaan lapangan kerja akan menyebabkan tingginya angka pengangguran. Usaha yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan adalah dengan memperbaiki sistem upah melalui kebijakan upah minimum. Upah minimum provinsi merupakan standar minimum yang digunakan oleh pemerintah, pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh dalam lingkungan usaha atau lingkungan kerjanya. Terbentuknya harga upah tenaga kerja dilatarbelakangi oleh teori yang disampaikan oleh David Ricardo yang menyatakan bahwa upah yang wajar adalah upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sendiri maupun keluarganya yang sesuai dengan kemampuan perusahaan. Selain daripada itu, upah ditentukan dengan melibatkan evaluasi dari kontribusi karyawan sebagai bentuk penghargaan baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan kemampuan dari organisasi dan peraturan hukum yang berlaku Fopuhunda, *et al.*, (2011) oleh karena itu saat menganalisis dampak upah minimum terhadap pekerjaan, harus memperhitungkan keragaman

regional yang cukup besar dari upah rata-rata di suatu daerah, upah minimum yang ditetapkan secara seragam dapat mempengaruhi permintaan tenaga kerja di pasar tenaga kerja regional hingga tingkat tertentu, yang berpotensi menciptakan penghalang bagi pekerja di daerah dengan produktivitas rendah (dan upah rendah) (Majchrowska, 2012). Pemberian upah atau kompensasi kepada karyawan harus wajar dan adil, karena dapat meningkatkan kemampuan karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerja, karena karyawan dapat merasakan kepuasan dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Pemberian kompensasi kepada karyawan dapat memotivasi dan memberikan kepuasan dalam bekerja (Saman, 2020).

Kondisi upah minimum dari tahun ke tahun mengalami perubahan, seiring dengan semakin tingginya harga kebutuhan hidup masyarakat. Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistika pada tahun 2015 upah minimum provinsi Jawa Barat yaitu sebesar Rp 1.000.000, pada tahun 2016 upah minimum provinsi mengalami kenaikan sebesar Rp 1.312.355, mengalami kenaikan lagi pada tahun 2017 sebesar Rp 1.420.624, pada tahun 2018 upah minimum provinsi Jawa Barat sebesar Rp 1.544.361 dan terus mengalami kenaikan hingga Rp 1.668.373 pada tahun 2019 (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2021). Kenaikan dari tingkat upah akibat dari pergerakan ekonomi yang mengalami kenaikan pada tiap tahunnya, dalam beberapa kasus, kenaikan upah memang dapat meningkatkan kesempatan kerja dengan asumsinya bahwa tingkat konsumsi masyarakat juga akan meningkat. Namun sebaliknya, jika *output* dari tenaga kerja itu tetap, maka penurunan pasti tidak bisa dihindari.

Produktivitas dan kualitas tenaga kerja dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi produktivitas kerjanya. Tingkat pendidikan merupakan salah satu investasi sumber daya manusia (SDM) yang dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul dan dapat menguntungkan suatu daerah yang memiliki aset atau potensi pembangunan dikarenakan semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai maka akan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya serta dengan keterampilan seperti keterampilan akademik, keterampilan berpikir tinggi dan kualitas pribadi dengan keahlian merupakan keterampilan yang dibutuhkan bagi lulusan untuk mencari pekerjaan, sehingga dapat memperoleh pekerjaan yang layak dengan gaji atau upah yang sesuai, dengan diperolehnya upah yang layak maka kesejahteraan penduduknya menjadi lebih sejahtera serta dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan kejahatan (Abas, 2016). Pendidikan yang tinggi dapat bermanfaat dalam membangun kapasitas sosial dan ekonomi dalam pembangunan negara (Jibeen, 2015). Tingkat pendidikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena tingkat pendidikan berperan dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Pendidikan merupakan salah satu aset utama yang perlu dipenuhi dalam rangka melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, diyakini kinerja ekonomi juga akan lebih baik (Kusuma, 2020).

Tingkat penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat menjadi masalah yang akan diteliti pada penelitian ini, dengan melakukan analisis faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi, dan tingkat pendidikan. Hal ini didukung oleh penelitian Wijaya (2014) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Penelitian yang dilakukan oleh Rochmani, dkk., (2017) juga menyatakan bahwa secara parsial pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Penelitian Indradewa (2015) bahwa upah minimum memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, Pangastuti (2015) juga menyatakan bahwa upah minimum berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Ganie (2017) pada penelitiannya menyatakan bahwa upah minimum dan tingkat pendidikan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Penelitian yang dilakukan oleh Effendi (2020) juga menyatakan bahwa tingkat pendidikan dan upah minimum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut. 1) Pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi, dan tingkat pendidikan berpengaruh secara simultan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat. 2) Pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi, dan tingkat pendidikan berpengaruh positif secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif berbentuk asosiatif atau hubungan yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Berbentuk asosiatif karena tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui hubungan tiga variabel yaitu pengaruh langsung pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi (UMP), dan tingkat pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat periode tahun 2005 - 2019. Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan data-data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat yang terkait dengan objek penelitian. Provinsi Jawa Barat dipilih karena perkembangan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat berfluktuasi dari tahun 2005-2019. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi (X1), upah minimum provinsi (UMP) (X2), dan tingkat pendidikan (X3) dan variabel terikatnya adalah penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat (Y). Data penelitian ini berupa pertumbuhan ekonomi, UMP, tingkat pendidikan dan penyerapan tenaga kerja yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat periode 2005-2019. Jumlah pengamatan dalam penelitian ini adalah sebanyak 15 titik pengamatan. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan teknik observasi nonpartisipan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu Regresi Linear Berganda. Pengolahan data analisis ini dikerjakan dengan menggunakan program SPSS. Persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \mu \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan:

Y	= Penyerapan Tenaga Kerja
α	= Konstanta
X1	= Pertumbuhan Ekonomi
X2	= UMP
X3	= Tingkat Pendidikan
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien Variabel Bebas
μ	= error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi (UMP), dan tingkat pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja yang diproyeksikan dengan model regresi berdasarkan pada Tabel 3.

Tabel 3.
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	18.446	.433		42.575	.000
X1 (Pertumbuhan Ekonomi)	.993	.295	.628	3.372	.004
X2 (UMP)	.425	.407	.271	2.104	.033
X3 (Tingkat Pendidikan)	1.795	.439	1.340	4.088	.001

a. Dependent Variable: Y

Sumber: *Data diolah, 2021*

Berdasarkan pengolahan data pada Tabel 3, menghasilkan persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut.

$$Y = 18,446 + 0,993X_1 + 0,425X_2 + 1,795X_3$$

$$\text{Sig} = \quad \quad 0,004 \quad 0,033 \quad 0,001$$

Keterangan:

- Y = Penyerapan Tenaga Kerja
 X1 = Pertumbuhan Ekonomi
 X2 = UMP
 X3 = Tingkat Pendidikan
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Variabel Bebas

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini berarti apabila pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar satu persen, maka penyerapan tenaga kerja meningkat sebesar 0,993 orang dengan asumsi variabel lainnya konstan. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sangat penting untuk memajukan pembangunan dan menggerakkan perekonomian di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang baik merupakan cerminan keberhasilan pembangunan suatu daerah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi akan menggerakkan sektor-sektor lainnya sehingga dari sisi produksi akan memerlukan tambahan tenaga kerja. Struktur lapangan usaha di Provinsi Jawa Barat telah beralih dari pertanian ke lapangan usaha ekonomi lainnya. Hal ini dapat dilihat dari besarnya peranan masing-masing lapangan usaha terhadap total PDRB. Sumbangan terbesar terbesar pada tahun 2010-2019 dihasilkan oleh lapangan usaha kategori industri pengolahan dengan rata-rata sebesar 43,01 persen; kemudian lapangan usaha kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan rata-rata sebesar 15,34 persen; dan lapangan usaha kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan rata-rata sebesar 8,94 persen. Sementara peranan lapangan usaha kategori lainnya kontribusinya di bawah 6 persen. Ketika produktivitas meningkat, maka pendapatan yang diperoleh akan lebih banyak sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup. Melalui penyerapan tenaga kerja dapat menggerakkan pertumbuhan agar berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Wijaya (2014) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hasil penelitian Rochmani, dkk., (2017) juga menyatakan bahwa secara parsial pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel UMP berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini berarti apabila UMP meningkat sebesar satu rupiah, maka penyerapan tenaga kerja naik sebesar 0,425 orang dengan asumsi variabel lainnya konstan. Guna kelancaran pelaksanaan kebijakan pengupahan, diperlukan adanya pemantauan atau pengawasan oleh Tim Pemantau Pelaksanaan Pengupahan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota. Dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja di daerah bertanggung jawab terhadap pemenuhan upah minimum

oleh perusahaan di wilayah masing-masing. Pengawasan yang dilakukan pemerintah mengenai pelaksanaan Upah Minimum Provinsi (UMP) bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pekerja. Disamping itu untuk mendidik pengusaha dan pekerja melalui sosialisasi penetapan upah minimum provinsi berdasarkan Undang-undang cipta kerja dan Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 tentang pengupahan agar selalu tertib melaksanakan ketentuan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan sehingga stabilitas ekonomi yang kuat bisa tercapai. Dasar hukum yang dapat dijadikan oleh pemerintah sebagai pedoman dalam memberikan perlindungannya dan menjembatani kepentingan antara pengusaha dan pekerja yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah dan adanya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.01/Men/1999 tentang Upah Minimum, dalam hal pengawasan diatur dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per.03/MEN/1984 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan Terpadu. Perusahaan yang belum melaksanakan Upah minimum Provinsi (UMP) akan diberi nota pemeriksaan oleh pegawai pengawas, sedangkan untuk perusahaan yang sudah melaksanakan Upah Minimum Provinsi (UMP) tidak perlu mendapat nota pemeriksaan karena berarti perusahaan tersebut telah melaksanakan ketentuan upah minimum yang berlaku.

Peringatan pertama diberlakukan bagi perusahaan yang belum melaksanakan Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan diberi nota pemeriksaan 1 (satu), setelah itu dilakukan monitoring. Jika setelah pemberian nota pemeriksaan 1 (satu) ketentuan upah minimum belum juga dilaksanakan, maka akan dikeluarkan nota pemeriksaan 2 (dua) dan terakhir sampai nota pemeriksaan 3 (tiga). Selanjutnya setelah dikeluarkannya nota pemeriksaan 3 (tiga) dan diadakan monitoring, ternyata tetap tidak diindahkan dan tidak ada tindakan dari perusahaan, maka pegawai pengawas akan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai upaya terakhir yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) berisi uraian pemeriksaan awal terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran yaitu tidak dilaksanakannya Upah Minimum Provinsi Jawa Barat. Setelah Berita Acara Pemeriksaan selesai, akan segera diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan sesuai dengan Pasal 81 angka 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa pengusaha yang membayar upah lebih rendah dari upah minimum dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Teori upah efisiensi (*efficiency-wage*) menyatakan upah tinggi membuat pekerja lebih produktif. Jadi, meskipun pengurangan upah akan menurunkan tagihan perusahaan, itu juga akan menurunkan produktivitas pekerja dan laba perusahaan. Menurut teori ini, perusahaan – perusahaan beroperasi secara lebih efisien jika upah berada di atas titik keseimbangan, oleh karena itu, perusahaan-perusahaan lebih diuntungkan jika mempertahankan upah tinggi meskipun terdapat surplus tenaga kerja. Hasil tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Indradewa (2015) yang menyatakan bahwa upah minimum memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hasil penelitian Pangastuti (2015) menyatakan bahwa upah minimum berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Hasil penelitian Ganie (2017) menyatakan bahwa upah minimum dan tingkat pendidikan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini berarti apabila tingkat pendidikan meningkat sebesar satu tahun, maka penyerapan tenaga kerja naik sebesar 1,795 orang dengan asumsi variabel lainnya konstan. Kondisi ini di sebabkan karena pendidikan merupakan faktor pendorong untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia. Tingkat pendidikan di Provinsi Jawa Barat meningkat setiap tahunnya. Tingkat pendidikan terbesar yaitu pada tahun 2019 sebesar 8,37 tahun, hal ini disebabkan karena mulai sadarnya masyarakat mengenai pentingnya peran

pendidikan dalam mendapatkan pekerjaan. Pentingnya pendidikan menyebabkan pemerintah mengamanatkan pada UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1) bahwa alokasi anggaran pendidikan minimal sebesar 20 persen dari APBD, namun hal ini tidak sesuai dengan persentase anggaran pendidikan masih di bawah 20 persen. Apabila persentase anggaran pendidikan cenderung menurun, hal ini dapat mempengaruhi sumber daya manusia (SDM), dan mengakibatkan rendahnya kualitas SDM. Pemerintah sangat penting untuk memperhatikan kembali agar anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBD terealisasi setiap tahunnya, guna memperbaiki kualitas sumber daya manusianya. Upaya meningkatkan kualifikasi pendidikan diantaranya dengan melakukan pemetaan penerimaan bantuan dengan memperhatikan rumah tangga miskin, rumah tangga dengan beban ketergantungan, dan jarak tempuh sekolah. Pembuatan database penerima beasiswa siswa dari keluarga miskin dengan pemutakhiran data setiap semester untuk menghindari pembayaran ganda dan pembayaran kepada pihak yang sudah tidak berhak. Penyelenggaraan pendidikan non formal yang bermutu untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang ingin meningkatkan dan atau memperoleh pengetahuan, kecakapan/keterampilan hidup dan kemampuan guna meningkatkan kualitas hidupnya yang tidak mungkin terpenuhi kebutuhannya melalui jalur formal. Pengadaan sosialisasi beasiswa bagi siswa miskin untuk meningkatkan kesadaran dan peran utama orang tua dan masyarakat bahwa pendidikan formal tidak kalah penting dengan pendidikan agama. Memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga miskin yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi. Pembangunan sekolah (sekolah baru/sekolah satu atap/penambahan ruang kelas) terutama SLTP dan SLTA.

Teori Human Capital menganggap pendidikan formal merupakan suatu investasi, baik bagi individu maupun masyarakat, dalam hubungan dengan kesempatan kerja untuk memperoleh pekerjaan yang lebih terbuka bagi mereka yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini karena pada umumnya tingkat kelangkaan dari lulusan pendidikan yang lebih tinggi juga lebih akurat, sehingga tingkat persaingannya untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai juga lebih longgar. Kesempatan kerja bagi lulusan pendidikan tinggi lebih terbuka, sehingga secara teoritis tingkat pengangguran pada kelompok ini cenderung lebih kecil dibanding kelompok yang berpendidikan lebih rendah, namun demikian kesempatan kerja itu akan menyempit dengan meningkatnya jumlah lulusan lulusan pendidikan tinggi. Hasil tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Buchari (2016) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan memberikan dampak signifikan positif pada penyerapan tenaga kerja. Hasil penelitian Effendi (2020) menyatakan bahwa tingkat pendidikan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hasil penelitian Mulyaputri (2017) menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja.

Secara simultan variabel pertumbuhan ekonomi, UMP, dan tingkat Pendidikan berpengaruh nyata terhadap penyerapan tenaga kerja dengan Fhitung sebesar 114,032 dan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak, yang berarti variabel pertumbuhan ekonomi, UMP, dan tingkat pendidikan berpengaruh secara simultan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat. Nilai R-Squared sebesar 0,969 berarti bahwa 96,9 persen variasi dari penyerapan tenaga kerja mampu dijelaskan oleh variasi pertumbuhan ekonomi, UMP, dan tingkat pendidikan, sedangkan 3,1 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil analisis data, variabel yang dominan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat adalah variabel tingkat pendidikan. Hal ini ditunjukkan oleh *standardized coefficients* beta variabel tingkat pendidikan yang paling besar yaitu sebesar 1,340.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi, Upah Minimum Provinsi (UMP), dan tingkat pendidikan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat. Pertumbuhan ekonomi, Upah Minimum Provinsi (UMP), dan tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat. Tingkat pendidikan berpengaruh dominan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan analisis dan kesimpulan yang dipaparkan, maka peneliti mengajukan saran Diharapkan pemerintah lebih memperhatikan sektor industri pengolahan; sektor perdagangan besar dan kecil, reparasi mobil dan sepeda motor; dan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan untuk dikembangkan lebih jauh lagi sehingga dapat menarik sektor lainnya untuk membuka kesempatan kerja yang lebih luas, melalui peningkatan pada komponen konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi, dan ekspor. Diharapkan antara pekerja/buruh dengan pengusaha mempunyai komitmen Bersama untuk saling bekerjasama dan saling memberikan yang terbaik. Pengusaha diharapkan mempunyai komitmen untuk membayar upah pekerja/buruh di atas upah minimum yang berlaku dan apabila pengusaha sudah beritikad baik memberikan upah kepada pekerja/buruh sesuai dengan ketentuan undang-undang atau bahkan melebihi ketentuan maka para pekerja/buruh harus mempunyai komitmen memberikan yang terbaik bagi perusahaan dengan meningkatkan kinerja dan produktivitasnya. Pemerintah diharapkan dapat memperbaiki infrastruktur dan kualitas pendidikan melalui meningkatkan anggaran pendidikan sehingga sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu minimal 20 persen dari APBD agar persentase anggaran pendidikan cenderung meningkat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, hal ini penting agar kualitas sumber daya manusia dapat terus ditingkatkan melalui pendidikan yang baik.

REFERENSI

- Abas, M. C. dan O. A. I. (2016). Graduates' Competence on Employability Skills and Job Performance. *International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)*, 5(2), 119.
- Akbar, J. S. dan N. S. R. (2021). Analysis Of Economic Growth And Export Development Of Bangka Belitung Islands. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAAR)*, 5(4).
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2021). *Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Barat*.
- Boediono. (2012). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. BPFY Yogyakarta.
- Buchari, I. (2016). Pengaruh Upah Minimum dan Tingkat Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Manufaktur di Pulau Sumatera Tahun 2012-2015. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), J. Ris. Ekon. dan Bisnis.
- Dwiarta, I. M. B. dan F. A. (2020). The Effect Of Regional Original Income And Accuracy Of Shopping Allocation On Regional Economic Growth In Lamongan. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAAR)*, 4(4).
- Effendi, A. dan M. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2014-2018. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 3(2), 500-515.
- Fopuhunda, Tinuke, S. O. dan L. I. O. (2011). Minimum Wage Implementation and Management in a Post Recession Economy: The Nigerian Experience. *European Scientific Journal*, 8(7), 18-35.
- Ganie, D. (2017). Analisis Pengaruh Upah, Tingkat Pendidikan, Jumlah Penduduk dan PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Berau Kalimantan Timur. *Jurnal EKSEKUTIF*, 14(2), 332-354.
- Inradewa, I. G. A. dan K. S. N. (2015). Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(8), 923-950.
- Jibeen, T. dan M. A. K. (2015). Internationalization of Higher Education: Potential Benefits and Costs. *International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)*, 4(4), 196.

- Kurniasih, E. P. (2017). Effect of Economic Growth On Income Inequality, Labor Absorption, And Welfare In Indonesia. *Economic Journal of Emerging Markets*, 9(2), 181–188.
- Kusuma, P. V. (2020). The Impact of Education on Regional Economic Performance In Indonesia. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 4(3).
- Majchrowska, A. dan Z. Z. (2012). The Impact of Minimum Wage on Employment in Poland. *Investigaciones Regionales*, 24, 211–239.
- Mulyaputri, I. G. A. K. & I. N. K. (2017). Pengaruh Investasi Swasta dan Tingkat Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten / Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 9(4), 935–962.
- Nikoloski, A. (2020). The Impact of Public Expenditures on Economic Growth of the Republic of North Macedonia. *Technium Social Sciences Journal*, 8, 249–258.
- Nurman. (2003). *Strategi Pembangunan Daerah*. Rajawali Pers.
- Pangastuti, Y. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah. *Economics Development Analysis Journal*, 2(4), 446–455.
- Pratiwi, N. P. A. dan I. G. B. I. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali. *Buletin Studi Ekonomi*, 24(2), 220–233.
- Rochmani, Tanti. S., Yunastiti Purwaningsih, dan A. S. (2017). Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 16(2), 50–61.
- Saman, A. (2020). Effect of Compensation on Employee Satisfaction and Employee Performance. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 4(1), 185–190.
- Suryana. (2000). *Ekonomi Pembangunan: Problematika serta Pendekatan*. Salemba Empat.
- Todaro, P. M., & S. C. S. (2006). *Pembangunan Ekonomi Edisi kesembilan*. Erlangga.
- Todaro, M. (1998). *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga* (Terjemahan). Erlangga.
- Wijaya, Andi, T. dan E. (2014). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Riau. *Jom FEKON*, 1(2), 1–15.